

TINJAUAN TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Agus Tiansyah

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, mengetahui isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mengetahui cara penyelesaian perselisihan para pihak akibat tidak menunaikan prestasi yang disetujui dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan dan teori hukum pembangunan, disamping teori perjanjian atau kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kontrak yang terdapat dalam lalu lintas hubungan hukum dalam masyarakat, maka kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah juga melahirkan perikatan bagi pihak yang mengadakannya. Perikatan yang lahir dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakannya yaitu pemerintah/pemerintah daerah dengan badan usaha atau orang perseorangan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normative*, yaitu penelitian hukum kepustakaan dan karena penelitian ini dilakukan dengan cara memiliki bahan kepustakaan.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa **prosedurnya** penyusunan kontrak Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengaturnya. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mencantumkan persyaratan harus memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dalam Pasal 10 ayat (4) tentang persyaratan menjadi anggota panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur siapa yang berwenang atau bertugas membuat konsep kontrak, sehingga dalam pelaksanaannya konsep kontrak disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;

Saran yang diberikan adalah supaya ditambahkan ketentuan mengenai isi kontrak dalam Pasal 29 ayat (1) Kepres RI No.80 Tahun 2003 dengan menambahkan ketentuan bagian-bagian kontrak terdiri dari surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kontrak;

Kata Kunci : barang/jasa pemerintah

REVIEW OF CONTRACT PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES BY THE PERSPECTIVE OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 80 OF 2003 ON GUIDELINES FOR THE PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES GOVERNMENT

Agus Tiansyah

Abstract

This study was conducted to determine the mechanism of contracting procurement of goods / services of the government, knowing the contents of the contract goods / services procurement of government, and to know how the dispute settlement the parties do not fulfill their due accomplishment agreed in the contract procurement of goods / services of the government. The theory used in this research is the theory of the welfare state and legal theory of development, in addition to the theory of agreement or contract. Contract procurement of government goods / services is one form of contract contained in the traffic law relationships in the community, then kontral procurement of government goods / services also bore engagement for those who hold it. Engagements born of contract goods / services procurement of government rights and obligations for the parties who hold it are government / local government and business entities or natural persons another. The method used is a normative juridical research. namely legal research literature and because the study was conducted in a way to have the literature.

Results of this study was formulated that the procedure of preparing the contract Presidential Decree No. 80 of 2003 does not regulate it. Presidential Decree No. 80 of 2003 does not specify requirements should understand the laws of agreement / contract for committee / official procurement of goods / services in Article 10 paragraph (4) of the requirements to become a member of the committee / procurement official government goods / services. Presidential Decree No. 80 of 2003 does not regulate who has the right or duty to make the concept of a contract, so in practice the concept of a contract drawn up by a committee of procurement of government goods / services;

The advice given is that added provisions regarding the contents of the contract in Article 29 paragraph (1) Rl Presidential Decree 80 of 2003 by adding provisions portions contract consists of a letter of agreement, the general terms of the contract, specific terms of the contract, and documents more related to the contract;

Keywords: *government goods / services*